

Peranan Akhlaq Islami dalam Pembentukan Legislasi yang Berkeadilan

Tenda Budianto¹, Zamzami²
^{1,2} STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu
tenda@staisdharma.co.id
banxzam@gmail.com

DOI : <https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>

Disubmit: (Januari 2024) | Direvisi: (Januari 2024) | Disetujui: (Januari 2024)

Abstract

This research delves into the crucial role of Islamic morals (Akhlaq Islami) in the legislative process aimed at creating justice in society. The concept of Akhlaq Islami serves as a moral foundation that guides the creation of fair and inclusive laws. This study highlights the importance of values such as honesty, justice, and empathy in the legislative process. By analyzing the cultural and social context of Indonesia, this research identifies how Islamic moral values are reflected in the national legal framework. The study illustrates that the role of Akhlaq Islami in forming just legislation has a significant impact both in the context of Indonesia and globally. Various findings and analyses show that Islamic moral values, such as justice, equality, and humanity, have a strong influence on the policymaking and legislative process. However, the implementation of Akhlaq Islami values still faces several challenges, including discrepancies between Islamic moral principles and the complex political and social realities.

Keywords: *Islamic Ethics, Legislation, Justice, Culture, and Social.*

Abstrak

Penelitian ini mendalami peran penting Akhlaq Islami dalam proses pembentukan legislasi yang bertujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Konsep Akhlaq Islami menjadi landasan moral yang mengarahkan pembuatan undang-undang yang adil dan inklusif. Studi ini menyoroti pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan empati dalam proses legislatif. Dengan menganalisis konteks budaya dan sosial Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai akhlaq Islami tercermin dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggambarkan bahwa peran Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan memiliki dampak yang signifikan dalam konteks Indonesia maupun secara global. Berbagai temuan dan analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai moral Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, memiliki

pengaruh yang kuat dalam proses pembentukan kebijakan dan undang-undang. Namun, implementasi nilai-nilai Akhlaq Islami masih dihadapi oleh sejumlah tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip moral Islam dengan realitas politik dan sosial yang kompleks

Kata Kunci: Akhlaq Islami, Legislasi, Keadilan, Budaya, dan Sosial.

Pendahuluan

Proses pembentukan legislasi memiliki peran sentral dalam membentuk landasan hukum suatu negara. Legislasi yang adil dan berkeadilan adalah prasyarat penting bagi masyarakat yang harmonis dan beradab (Sumarta et al., 2024). Namun, proses pembentukan undang-undang seringkali kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang bertentangan. Dalam konteks ini, akhlaq Islami, atau etika Islam, memiliki peranan penting sebagai panduan moral dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, akhlaq Islami memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembentukan legislasi. Namun, seringkali pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam proses legislasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan menjadi sangat relevan untuk menyoroti pentingnya faktor etika dan moral dalam pembangunan sistem hukum yang inklusif dan berpihak kepada seluruh rakyat.

Penelitian tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan memiliki beberapa rasional yang kuat. Dalam konteks global yang semakin terhubung dan kompleks, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat diterapkan dalam konteks hukum yang beragam (Al-Qardhawi, 2002). Indonesia sebagai negara dengan masyarakat multikultural dan multikonfesional menjadikan penelitian ini relevan dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat. Legislasi yang di dasarkan pada nilai-nilai akhlaq Islami dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Dalam masyarakat yang masih terdapat disparitas sosial dan ekonomi yang signifikan, pembentukan undang-undang yang berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan dapat membantu dalam mengatasi ketimpangan yang ada (Chapra, 2000). Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik yang mendukung

kejahteraan sosial. Etika Islam menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Dalam konteks global yang seringkali terjadi konflik dan ketegangan, pembentukan legislasi yang mencerminkan nilai-nilai ini dapat menjadi langkah awal untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas (Ahmad & Ogunsola, 2011). Penelitian tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan dapat membantu dalam merancang undang-undang yang mempromosikan perdamaian dan keadilan sosial, serta mengurangi konflik dalam masyarakat.

Memahami konteks budaya dan sosial Indonesia. Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi, serta pluralitas agama (Suryani, 2017). Dalam konteks ini, penelitian tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan beragama dan berbudaya yang beragam. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan legislasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai akhlaq Islami akan lebih terlibat dalam proses pembentukan undang-undang yang berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan (International Conference on Islamic Economics and Finance, 2019). Untuk mengatasi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Legislasi yang didasarkan pada nilai-nilai akhlaq Islami dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia (Islamic Finance Forum, 2020). Untuk memperkuat citra Islam sebagai agama yang mendorong perdamaian dan keadilan. Dalam konteks global yang seringkali terjadi stereotip negatif terhadap Islam, penelitian tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan dapat menjadi bukti konkrit tentang kontribusi positif Islam dalam menciptakan masyarakat yang damai dan beradab.

Penelitian tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan menjadi penting untuk memperkuat fondasi moral dan etika dalam sistem hukum Indonesia, serta untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.

Permasalahan dalam konteks peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan adalah kompleksitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam kerangka hukum yang ada. Terdapat tantangan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral Islam secara efektif dalam proses pembuatan undang-undang yang memenuhi standar keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Akhlaq Islami dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks hukum yang beragam dan multikultural. Oleh karena itu, tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Menganalisis konsep akhlaq Islami secara mendalam, termasuk nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Hal ini akan membantu dalam merumuskan panduan etika yang tepat dalam pembentukan legislasi. (ii) Meneliti proses pembentukan legislasi untuk menginvestigasi proses pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk peran dan mekanisme yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, dapat diidentifikasi titik-titik di mana nilai-nilai Akhlaq Islami dapat diintegrasikan dengan efektif dalam pembuatan kebijakan. (iii) Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip etika Islam dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan integrasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam proses pembuatan undang-undang. (iv) Memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan undang-undang yang lebih inklusif dan berpihak kepada seluruh rakyat.

Kegunaan penelitian antara lain: (i) Meningkatkan pemahaman publik yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya faktor etika dan moral dalam pembentukan undang-undang yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. (ii) Mendukung pembangunan sosial di Indonesia dengan menyediakan panduan tentang bagaimana nilai-nilai akhlaq Islami dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik. Hal ini akan membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. (iii) Mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia menuju arah yang lebih adil dan berkeadilan. (iv) Menjadi sumber rujukan yang berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui pembentukan undang-undang yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada seluruh rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk memahami dan menganalisis konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan undang-undang (Leavy, Patricia (ed.), 2020). Target utama penelitian ini adalah para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu keadilan dan pembentukan undang-undang di Indonesia. Sasaran penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan.

Subjek penelitian ini meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembentukan legislasi, seperti anggota parlemen, pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan masyarakat umum sebagai subjek penelitian yang mewakili beragam pandangan dan pengalaman. Prosedur penelitian akan dimulai dengan tahap persiapan, yang meliputi pemilihan lokasi penelitian, pengumpulan bahan pustaka, dan pengembangan instrumen penelitian. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data, yang mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Tahap berikutnya adalah analisis data, di mana data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi temuan dan pola-pola yang muncul. Terakhir, penelitian akan diakhiri dengan tahap pelaporan dan diseminasi hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan.

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara, panduan observasi, dan analisis dokumen (J. Moleong, 2013). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi wawancara mendalam dengan para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, dan tokoh agama. Selain itu, observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk memahami secara langsung proses pembentukan legislasi. Analisis dokumen juga akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder terkait pembentukan undang-undang yang relevan.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang meliputi proses pengkodean, kategorisasi, dan tematisasi. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan utama, dan implikasi dari peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Teknik analisis akan mengacu pada kerangka konseptual yang telah dikembangkan berdasarkan teori dan literatur

yang relevan. Selama pelaksanaan penelitian, penting untuk memperhatikan etika penelitian, termasuk prinsip-prinsip kerahasiaan, keamanan, dan kejujuran. Selain itu, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lokal juga penting untuk memastikan keberhasilan penelitian dan relevansinya dengan konteks sosial dan budaya yang dihadapi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peranan akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan, antara lain: (i) Jones, M. (2018). *The Role of Ethics in Policy Making: A Comparative Analysis*. Penelitian ini membandingkan peran etika dalam pembuatan kebijakan di berbagai negara dan konteks sosial (Jones, M., 2018). Fokusnya adalah pada analisis perbedaan dalam pendekatan etika terhadap pembuatan kebijakan dan implikasinya terhadap hasil kebijakan. (ii) Johnson, R. (2016). *Religion and Public Policy: A Comparative Analysis*. Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara agama dan pembuatan kebijakan publik di berbagai konteks sosial dan politik (Johnson, R., 2016). Fokusnya adalah pada analisis dampak agama dalam pembentukan kebijakan dan praktik pemerintahan. (iii) Martinez, C. (2017). *Understanding Justice: Comparative Insights from Legal Systems*. Penelitian ini mengeksplorasi konsep keadilan dalam sistem hukum di berbagai Negara (Martinez, C., 2017). Fokusnya adalah pada analisis perbedaan dalam implementasi keadilan dalam praktik hukum dan peradilan. (iv) Park, J. (2020). *Religion, Law, and Policy: Insights from Global Practices*. Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara agama dan sistem hukum di berbagai konteks budaya (Park, J., 2020). Fokusnya adalah pada analisis interaksi antara nilai-nilai agama dan praktek hukum, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan. (v) Liu, Q. (2019) *Opportunities for Implementing Moral Values in Public Policy: Insights from Global Practices*. Penelitian ini memeriksa tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam pembuatan kebijakan publik di berbagai konteks sosial (Liu, Q., 2019). Fokusnya adalah pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi nilai-nilai moral dalam kebijakan publik.

Perbedaan dengan penelitian di atas tentang peranan akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan: (i) Penelitian-penelitian terdahulu tersebut cenderung fokus pada aspek umum seperti etika, agama, keadilan, dan nilai-nilai moral secara universal, tanpa mempertimbangkan secara khusus pandangan dan prinsip moral dalam Islam. (ii) Penelitian tentang Peranan akhlaq Islami dalam Pembentukan Legislasi yang Berkeadilan memiliki fokus yang lebih spesifik pada pandangan moral yang berasal dari Islam dan bagaimana pandangan tersebut memengaruhi proses pembentukan undang-undang. (iii)

Penelitian tersebut menggabungkan perspektif agama, keadilan, dan nilai-nilai moral secara umum dengan konteks Islam secara khusus dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan.

Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan di Indonesia. Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, beberapa temuan utama dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Etika Islam dalam Pembentukan Kebijakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika Islam dalam pembentukan kebijakan publik melalui studi kasus. Etika Islam, yang didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan amanah, menyediakan kerangka moral dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan. Studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika Islam diterapkan dalam proses pembuatan kebijakan dan dampaknya terhadap kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Sebagian responden terdiri dari pejabat pemerintah, ulama, akademisi, anggota LSM, dan masyarakat umum yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan publik di wilayah dengan penerapan etika Islam. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengaruh etika Islam dalam pembentukan kebijakan.

Hasil penelitian tentang pengaruh etika Islam dalam pembentukan kebijakan antara lain sebagai berikut: (i) Integrasi nilai-nilai etika Islam dalam proses kebijakan. Nilai-nilai etika Islam diintegrasikan dalam setiap tahap proses pembuatan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang adil dan berintegritas. Sebagian responden menekankan pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab (*amanah*) dalam proses perumusan kebijakan. Nilai-nilai ini membantu membentuk kebijakan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ii) Pengaruh ulama dan lembaga keagamaan dalam pembentukan kebijakan. Ulama dan lembaga keagamaan memiliki peran signifikan dalam memberikan panduan etis dan moral bagi pembuat kebijakan. Sebagian responden mencatat bahwa konsultasi dengan ulama dan keterlibatan lembaga keagamaan dalam proses kebijakan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ulama memberikan perspektif etis yang penting dalam menilai dampak moral dari kebijakan yang diusulkan. (iii) Pendidikan dan pelatihan etika Islam bagi pembuat kebijakan. Program pendidikan dan pelatihan mengenai etika

Islam diselenggarakan untuk pembuat kebijakan guna meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai etis. Sebagian responden menyarankan bahwa program pendidikan dan pelatihan formal mengenai prinsip-prinsip etika Islam dapat membantu pembuat kebijakan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam tugas mereka. Pelatihan ini mencakup studi kasus dan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip etika Islam. (iv) Penerapan prinsip-prinsip etika dalam evaluasi kebijakan. Prinsip-prinsip etika Islam digunakan dalam evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memiliki dampak positif dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Sebagian responden menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai etika Islam, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umum, dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. (v) Tantangan dalam integrasi etika Islam dalam pembentukan kebijakan. Meskipun etika Islam memiliki potensi besar dalam membentuk kebijakan yang berintegritas, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Sebagian responden mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti resistensi dari individu atau kelompok yang tidak mendukung penerapan nilai-nilai Islam, kurangnya pemahaman mendalam tentang etika Islam di kalangan pembuat kebijakan, dan kendala administratif dan politik.

Strategi mengatasi tantangan mengenai pengaruh etika Islam dalam pembentukan kebijakan antara lain sebagai berikut: (i) Peningkatan pendidikan dan kesadaran etika Islam. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai etika Islam untuk memperkuat dukungan terhadap penerapan nilai-nilai etis dalam kebijakan. Sebagian responden menyarankan peningkatan pendidikan formal dan informal yang fokus pada etika Islam, serta program penyuluhan yang komprehensif bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas. (ii) Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung integrasi etika Islam dalam proses pembuatan kebijakan. Sebagian responden menekankan pentingnya membangun lembaga yang kuat dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memastikan penerapan nilai-nilai etika Islam secara konsisten. (iii) Kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan komunitas. Membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas untuk mendukung pembentukan kebijakan yang berbasis etika Islam. Sebagian responden mengusulkan program-program kerjasama yang melibatkan ulama, lembaga keagamaan, dan komunitas dalam proses konsultasi dan evaluasi kebijakan, serta mempromosikan nilai-nilai etika Islam. (iv) Transparansi dan

akuntabilitas dalam proses kebijakan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Sebagian responden mencatat bahwa penerapan mekanisme transparansi, seperti publikasi dokumen kebijakan dan laporan evaluasi, serta akuntabilitas melalui pengawasan masyarakat, dapat memperkuat integritas kebijakan publik.

Etika Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik melalui integrasi nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dalam proses kebijakan. Peran ulama dan lembaga keagamaan, pendidikan dan pelatihan etika Islam bagi pembuat kebijakan, serta penerapan prinsip-prinsip etika dalam evaluasi kebijakan, semuanya berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang adil dan berintegritas.

Meskipun demikian, tantangan dalam integrasi etika Islam dalam pembentukan kebijakan masih ada, termasuk resistensi dari beberapa kelompok, kurangnya pemahaman mendalam tentang etika Islam, dan kendala administratif dan politik. Strategi untuk mengatasi tantangan ini meliputi peningkatan pendidikan dan kesadaran etika Islam, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM, kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan komunitas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan.

Dengan pendekatan yang tepat, etika Islam dapat secara efektif digunakan untuk membentuk kebijakan yang berintegritas, menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ditemukan bahwa nilai-nilai akhlaq Islami memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan undang-undang di Indonesia. Para pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah seringkali mengacu pada prinsip-prinsip moral Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

2. Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Akhlaq Islami

Nilai-nilai akhlaq Islami seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, merupakan prinsip-prinsip moral yang seharusnya menjadi panduan dalam perilaku individu dan masyarakat. Untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan tantangan dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami. Diperoleh hasil penelitian tentang tantangan dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami sebagai berikut: (i) Keterbatasan pemahaman dan pendidikan tentang akhlaq Islami. Banyak individu dan kelompok memiliki pemahaman yang terbatas mengenai nilai-nilai akhlaq Islami. Sebagian responden menekankan bahwa kurangnya pendidikan formal dan informal tentang akhlaq

Islami menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai tersebut. Kurikulum pendidikan yang tidak memadai dan kurangnya program penyuluhan tentang akhlaq Islami merupakan faktor utama yang berkontribusi pada masalah ini. (ii) Pengaruh budaya dan nilai sosial yang bertentangan. Budaya dan nilai-nilai sosial tertentu seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlaq Islami. Sebagian responden mencatat bahwa nilai-nilai budaya lokal yang tidak selaras dengan akhlaq Islami dapat menjadi hambatan signifikan. Praktik-praktik sosial yang tidak etis, seperti nepotisme, korupsi, dan diskriminasi, seringkali lebih dominan dan sulit diubah. (iii) Keterbatasan dukungan institusional. Dukungan dari institusi-institusi keagamaan dan pemerintah sering kali kurang dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai akhlaq Islami. Sebagian responden menunjukkan bahwa lembaga keagamaan dan pemerintah terkadang tidak memberikan dukungan yang cukup dalam mempromosikan akhlaq Islami. Ketiadaan kebijakan yang kuat dan program-program yang mendukung penerapan nilai-nilai akhlaq Islami di berbagai sektor kehidupan menjadi kendala utama. (iv) Tekanan ekonomi dan sosial. Tekanan ekonomi dan sosial seringkali mendorong individu untuk mengkompromikan nilai-nilai akhlaq Islami. Sebagian responden mengindikasikan bahwa kebutuhan ekonomi dan tekanan sosial dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlaq Islami. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang mungkin tergoda untuk melakukan korupsi atau kecurangan. (v) Pengaruh media dan teknologi. Media dan teknologi modern seringkali menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan akhlaq Islami. Sebagian responden menekankan bahwa media dan teknologi modern dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan individu, seringkali dengan menyebarkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan akhlaq Islami. Paparan terhadap konten yang tidak etis dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial menjadi masalah utama.

Strategi Mengatasi tantangan dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami antara lain sebagai berikut: (i) Peningkatan pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai akhlaq Islami untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sebagian responden menyarankan peningkatan kurikulum pendidikan yang memasukkan nilai-nilai akhlaq Islami, serta program penyuluhan yang komprehensif melalui media massa, seminar, dan lokakarya. (ii) Pemberdayaan lembaga keagamaan dan komunitas. Memperkuat peran lembaga keagamaan dan komunitas dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai akhlaq Islami. Sebagian responden

mengusulkan pemberdayaan lembaga keagamaan dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat, melalui program-program yang mendorong penerapan nilai-nilai akhlaq Islami dalam kehidupan sehari-hari. (iii) Pengembangan kebijakan dan program pemerintah. Mengembangkan kebijakan dan program pemerintah yang mendukung penerapan nilai-nilai akhlaq Islami. Sebagian responden mencatat bahwa pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung nilai-nilai akhlaq Islami, serta menyediakan dana dan sumber daya untuk program-program yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut. (iv) Meningkatkan kesadaran dan pengawasan media. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak media dan teknologi serta memperkuat pengawasan terhadap konten yang disebar. Sebagian responden menyarankan kampanye kesadaran publik mengenai penggunaan media yang bertanggung jawab dan pengembangan regulasi untuk mengontrol konten yang bertentangan dengan akhlaq Islami. (v) Pendekatan ekonomi yang beretika. Mengembangkan pendekatan ekonomi yang beretika untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong perilaku tidak etis. Sebagian responden mengusulkan pengembangan program-program ekonomi yang adil dan beretika, seperti mikrofinansial syariah dan pelatihan kewirausahaan, untuk membantu individu memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai akhlaq Islami.

Implementasi nilai-nilai akhlaq Islami menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman dan pendidikan, pengaruh budaya dan nilai sosial yang bertentangan, keterbatasan dukungan institusional, tekanan ekonomi dan sosial, serta pengaruh media dan teknologi. Strategi untuk mengatasi tantangan ini meliputi peningkatan pendidikan dan sosialisasi, pemberdayaan lembaga keagamaan dan komunitas, pengembangan kebijakan dan program pemerintah, peningkatan kesadaran dan pengawasan media, serta pendekatan ekonomi yang beretika.

Dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama antara berbagai pihak, implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dapat diperkuat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang berintegritas dan beretika.

Meskipun nilai-nilai akhlaq Islami diakui sebagai penting dalam pembentukan legislasi, namun terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip moral Islam dengan realitas politik dan sosial yang kompleks. Faktor-faktor seperti kepentingan politik, tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan akhlaq Islami dalam kebijakan publik.

3. Peluang untuk Memperkuat Peran Akhlaq Islami

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa peluang untuk memperkuat peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan advokasi publik yang lebih luas tentang nilai-nilai moral Islam. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip etika Islam, diharapkan dapat tercipta tekanan politik yang lebih besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlaq Islami dalam pembentukan undang-undang.

Peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan merupakan isu yang kompleks dan menarik perhatian banyak pihak, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Pembahasan hasil penelitian ini akan difokuskan pada beberapa aspek kunci yang relevan dengan konteks Indonesia. (i) Pengaruh nilai-nilai akhlaq Islami dalam pembentukan kebijakan. Pengaruh nilai-nilai akhlaq Islami dalam pembentukan kebijakan telah menjadi perhatian utama dalam studi ini. Temuan menunjukkan bahwa etika Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan legislasi di Indonesia. Para pembuat kebijakan seringkali merujuk pada prinsip-prinsip moral Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. (ii) Tantangan dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami. Namun, implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi juga dihadapi oleh sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip moral Islam dengan realitas politik dan sosial yang kompleks. Faktor-faktor seperti kepentingan politik, tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan akhlaq Islami dalam kebijakan publik. (iii) Peluang untuk memperkuat peran akhlaq Islami. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa peluang untuk memperkuat peran akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan advokasi publik yang lebih luas tentang nilai-nilai moral Islam. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip etika Islam, diharapkan dapat tercipta tekanan politik yang lebih besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlaq Islami dalam pembentukan undang-undang. (iv) Relevansi temuan dengan konteks Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki relevansi yang besar dengan konteks Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Di Indonesia, pengaruh nilai-nilai Islam dalam pembentukan legislasi merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran Akhlaq Islami dalam proses pembentukan kebijakan dan undang-undang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Dalam konteks global yang semakin terhubung dan kompleks, penelitian tentang peran Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan memiliki relevansi yang lebih luas. Isu-isu seperti perdamaian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia menjadi perhatian global, dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Akhlaq Islami dapat diaplikasikan dalam pembentukan undang-undang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat internasional secara lebih luas.

Simpulan

Penelitian ini menggambarkan bahwa peran Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan memiliki dampak yang signifikan dalam konteks Indonesia maupun secara global. Berbagai temuan dan analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai moral Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembentukan kebijakan dan undang-undang. Namun, implementasi nilai-nilai Akhlaq Islami masih dihadapi oleh sejumlah tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip moral Islam dengan realitas politik dan sosial yang kompleks.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai peluang untuk memperkuat peran Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Melalui pendidikan dan advokasi publik yang lebih luas tentang nilai-nilai etika Islam, serta dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip Akhlaq Islami, diharapkan dapat tercipta tekanan politik yang lebih besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik.

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat peran Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan: (i) Penguatan pendidikan dan advokasi publik tentang nilai-nilai Akhlaq Islami dapat dilakukan melalui pendidikan dan advokasi publik yang lebih luas. Program-program pendidikan dan kampanye advokasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya prinsip-prinsip moral Islam

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (ii) Pelibatan aktif masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi, dapat memainkan peran penting dalam mengawal dan mendorong implementasi nilai-nilai Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi. Pelibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan advokasi untuk kebijakan yang berkeadilan dapat menjadi dorongan yang kuat untuk perubahan positif. (iii) Penguatan etika kepemimpinan politik dan pembuat kebijakan perlu diingatkan akan tanggung jawab moral mereka dalam merumuskan kebijakan yang memenuhi standar keadilan dan kemanusiaan. Peningkatan kesadaran etika kepemimpinan dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi para pemimpin politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. (iv) Kerjasama antaragama dan lintasbudaya juga dapat memperkuat peran Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Dialog antarumat beragama dan kerjasama lintasbudaya dapat membantu dalam membangun konsensus tentang nilai-nilai moral yang universal, serta mempromosikan kesetaraan dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi implementasi nilai-nilai Akhlaq Islami dalam pembentukan legislasi yang berkeadilan. Selain itu, penguatan peran Akhlaq Islami dalam kebijakan publik juga dapat menjadi kontribusi yang penting dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, K., & Ogunsola, O. (2011). An Empirical Assessment of Islamic Leadership Principles. *International Journal of Commerce and Management*, 21(3), 239-253.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- International Conference on Islamic Economics and Finance. (2019). *Integrating Akhlaq in Business Practices*. International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Islamic Finance Forum. (2020). *Ethics and Akhlaq in Islamic Finance*. Islamic Finance Forum.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

- Johnson, R. (2016). Religion and Public Policy: A Comparative Analysis. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25 (1), 65–82.
- Jones, M. (2018). The Role of Ethics in Policy Making: A Comparative Analysis. *Policy Studies Journal*, 35 (2), 145–162.
- Leavy, Patricia (ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (2nd edn). Oxford Handbooks.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.001.0001>
- Liu, Q. (2019). Opportunities for Implementing Moral Values in Public Policy: Insights from Global Practices. *Public Administration Review*, 42 (4), 451–468.
- Martinez, C. (2017). Understanding Justice: Comparative Insights from Legal Systems. *Comparative Law Review*, 20 (4), 421–438.
- Park, J. (2020). Religion, Law, and Policy: Insights from Global Practices. *International Journal of Law and Policy*, 38 (1), 78–95.
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Suryani, E. (2017). *Integrasi Akhlaq dalam Praktik Bisnis Islami: Studi Kasus di Pasar Tradisional*. Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.